

Peran Inaportnet Dalam Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado

Nastasia Inri Putri Pongsituru^{1*}, Yustiani Frastica², Stevian G.A. Rakka³,
Azhar Ariansyah Ansar⁴

¹⁻⁴Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Indonesia
info@poltekpelsulut.ac.id^{1*}, azharariansyahansar@gmail.com⁴

Alamat: Jl.Trans Sulawesi, KM.80 Desa tawaang, Kec. Amurang, Kab.Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95355

Korespondensi penulis: inripongsituru@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the impact of Inaportnet implementation on the process of issuing the Sailing Approval Letter (SPB) online at the Class III Manado Port Authority and Harbor Master's Office. Inaportnet is an internet-based system designed to facilitate and expedite the shipping administration process, with the goal of improving efficiency and transparency in port services. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, involving data collection through interviews with port officials and service users, as well as direct field observations. The results of the study indicate that the implementation of Inaportnet has a significantly positive impact on the SPB issuance process. The use of this system successfully speeds up processing time, reduces excessive bureaucracy, and enhances transparency and accountability in services. However, the study also found some challenges in its implementation, such as technical issues with the system, lack of supporting infrastructure, and the need for further training for involved staff. Therefore, to optimize the benefits of Inaportnet, it is recommended to improve technological infrastructure, provide regular training for staff, and conduct routine monitoring and evaluation of the system's performance.*

Keywords: Publishing, Sailing Approval Letter (SPB), Online, Port Authority Office.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Inaportnet terhadap proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) online di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado. Inaportnet adalah sistem berbasis internet yang dirancang untuk memfasilitasi dan mempercepat proses administrasi pelayaran, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan pelabuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan petugas pelabuhan dan pengguna jasa, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Inaportnet memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses penerbitan SPB. Penggunaan sistem ini berhasil mempercepat waktu pemrosesan, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasinya, seperti masalah teknis pada sistem, kurangnya infrastruktur jaringan pendukung, dan kebutuhan akan pelatihan lebih lanjut bagi petugas yang terlibat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan manfaat Inaportnet, disarankan adanya peningkatan infrastruktur teknologi, penyediaan pelatihan berkala bagi petugas, dan pemantauan serta evaluasi rutin terhadap kinerja sistem.

Kata Kunci: Penerbitan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Online, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

1. LATAR BELAKANG

Kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar. Surat persetujuan berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan. Dalam proses penerbitan SPB pihak pemohon atau pihak agen mengajukan permohonan kepada pihak syahbandar. Setelah itu pihak syahbandar

akan melakukan proses pemeriksaan terhadap dokumen dan surat kapal kepada pihak syahbandar.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi berkembang dengan pesat sehingga mendorong Kementerian Perhubungan melalui Jenderal Perhubungan Laut pada sub bagian Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut dan Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai memberikan kemudahan dalam sistem pelayanan syahbandar yaitu dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Kementerian perhubungan telah membangun suatu sistem untuk mempermudah pengguna jasa yaitu dengan menggunakan inaportnet. Indonesian Portnet (Inaportnet) merupakan layanan yang dipergunakan secara online untuk membantu proses permohonan pelayanan kapal sampai dikeluarkannya izin pengoperasian kapal. Mulai dari kapal masuk, kapal tambat, kapal tunda, hingga kapal keluar termasuk pembayaran PNBK. Penerapan layanan Inaportnet dilakukan sesuai kewenangan dari setiap instansi yang terkait berdasarkan tugas, fungsi, serta tanggung jawab dalam pelayanan kapal, dan barang di pelabuhanyang tertuang dalam PM 157 Tahun 2015.

Instansi yang juga membantu dalam kepengurusan pelayaran dan keselamatan berlayar adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Dalam hal ini penulis sedang melaksanakan praktek di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas III Manado. Menurut PM 36 Tahun 2012, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. KSOP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial

Dalam hal ini kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas III Manado juga menggunakan pelayanan dokumen kapal melalui sistem Inaportnet. Namun ada beberapa halangan dan kendala yang dihadapi saat proses penyelesaian dokumen kapal menggunakan system inaportnet ini diantaranya sering terjadi gangguan jaringan, gangguan sistem dari pusat yang mengadakan perbaikan sistem atau pembaruan sistem yang tidak terjadwal, serta kesalahan yang sering terjadi karena kurang tanggap nya petugas KSOP itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Studi Tentang Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) *Online* Di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado”.

2. KAJIAN TEORITIS

Inaportnet

Inaportnet (*Indonesian Port Integration*) merupakan layanan yang dipergunakan untuk membantu proses permohonan pelayanan kapal sampai dikeluarkannya izin pengoperasian kapal, mulai dari kapal masuk, kapal tambat, kapal tunda, hingga kapal keluar termasuk pembayaran PNBP. Inaportnet adalah salah satu program Kementerian Perhubungan yang penerapannya di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang ditunjuk dan tertuang dalam PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan. Inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet/web untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan di pelabuhan. Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

Pengertian Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal dan kewajibannya. Surat persetujuan berlayar mencakup informasi penting tentang kapal, rute perjalanan yang diizinkan, jumlah dan jenis kargo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 154 Tahun 2015 tentang Surat Persetujuan Syahbandar Online, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) *Online* adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik sehingga kapal secara teknis administrasi sudah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal untuk berlayar

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Menurut UU No.17 Tahun 2008 Pasal 207 tentang Pelayaran, Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan serta melakukan pengawasan penuh terhadap ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakkan hukum dibidang

angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan seluruh Indonesia.

Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih nyata dengan menampilkan data yang fakta tanpa proses manipulasi atau perlakuan – perlakuan lain. Penelitian ini menggunakan data hasil dari informan disaat melakukan wawancara guna menguraikan fakta atau hasil yang di dapatpenguajian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Selama melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado. Penelitian ini membahas tentang peran penting inaportnet dalam penerbitan surat persetujuan berlayar *online* di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado terkait kendala apa saja yang di dapati serta upaya yang dilakukan oleh pihak KSOP Kelas III Manado agar supaya penerbitan SPB dapat berlangsung lebih teratur dan efisien

Pembahasan

Berdasarkan pembahasan penulis serta observasi yang dilakukan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado, berikut akan penulis paparkan Penerapan Inaportnet di KSOP Kelas III Manado dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar *Online*.

a. Penerapan Sistem Inaportnet di KSOP Kelas III Manado

Penerapan sistem inaportnet di KSOP Kelas III Manado dimulai sejak tahun 2019 semenjak pandemi *Covid 19*. sistem inaportnet ini sangat diperlukan khususnya saat pandemi berlangsung karena membatasi interaksi dengan pengguna jasa sehingga memudahkan dalam

mengurus berbagai dokumen kapal, seperti penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, buku pelaut, dan dokumen lainnya. Selain dalam masa pandemi, penerapan sistem inaportnet juga memiliki beberapa kelebihan, berikut kelebihan dari sistem inaportnet :

- a. Transparansi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan
- b. *First come first served* sehingga mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pelayanan
- c. Mempercepat dalam penyelesaian pelayanan kapal dan barang
- d. Meminimalisasi biaya yang diperlakukan dalam penanganan pelayanan kapal dan barang
- e. Meningkatkan validitas dan akurasi data yang terkait dengan kegiatan pelayanan kapal dan barang
- f. Meningkatkan daya saing nasional
- g. Bisa diakses dimana saja dan kapan saja
- h. Sistem *safety* karena data serta informasi terjamin kerahasiaannya
- i. Sistem cerdas karena dapat menyesuaikan kondisi serta tujuan dari pemakai jasa.

Namun meskipun penerapan sistem inaportnet di KSOP Kelas III Manado sudah dimulai, sistem pelayanan manual masih tetap dilaksanakan karena masih ada beberapa kendala dari sistem pelayanan online menggunakan inaportnet. Berikut kekurangan dalam sistem inaportnet :

- a. Penggunaan sistem yang bergantung di jaringan internet, sehingga dalam kondisi tertentu jika koneksi jaringan mengalami gangguan, pelayanan online tidak dapat dilaksanakan dan harus beralih ke pelayanan manual.
- b. Adanya petugas dan pihak pengguna jasa kepelabuhanan yang masih belum mahir dan belum menguasai sepenuhnya sistem inaportnet sehingga masih banyak yang bingung saat masuk kedalam sistem inaportnet dan mengakibatkan lebih banyak waktu yang terpakai.

b. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar *Online*

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) *Online* dapat diajukan apabila pengguna jasa kepelabuhanan telah mendapat persetujuan akses masuk ke sistem inaportnet secara sah oleh pihak syahbandar. Setelah mendapat akses sah untuk masuk ke sistem inaportnet, pengguna layanan jasa kepelabuhanan dapat mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar secara *Online*. Berikut ini langkah dan tahapan dalam pengajuan Surat Persetujuan Berlayar *Online* dalam sistem inaportnet :

1. Setiap kapal yang akan mengajukan Surat Persetujuan Berlayar wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan mengisi formulir warta keberangkatan kapal yang tersedia dengan mengunggah dokumen yang diperlukan :

- a) Data awak kapal
 - b) Data penumpang
 - c) Data muatan
 - d) Data barang berbahaya
 - e) Data bunker dan pencemaran
2. Pihak pengguna yang akan mengajukan Surat Persetujuan Berlayar wajib mengunggah dokumen wajib lainnya yang diperlukan saat pengajuan Surat Persetujuan Berlayar *Online* ke pihak syahbandar diunggah dalam bentuk dokumen elektronik di portal Inaportnet.
- a) Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian
 - b) Crew List
 - c) Daftar penumpang
 - d) Manifest barang atau daftar muatan palka
 - e) Manifest khusus barang berbahaya
 - f) Daftar pemeriksaan kelengkapan dan validitas surat dan kapal
3. Setelah pihak pengguna layanan jasa kepelabuhanan mengunggah dokumen yang diperlukan, selanjutnya pihak Syahbandar wajib memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diunggah. Apabila terdapat dokumen yang masih belum lengkap pihak syahbandar akan memberikan informasi melalui portal inaportnet untuk merevisi kembali dokumen pengajuan yang diajukan pihak pengguna jasa layanan kepelabuhanan.
4. Hasil verifikasi dokumen pengajuan dari pihak pengguna jasa layanan kepelabuhanan jika dinyatakan lengkap dan benar, pihak syahbandar akan memberikan persetujuan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dalam bentuk dokumen online.
5. Setelah Surat Persetujuan diterbitkan, pihak pengguna jasa akan menerima kode layanan SPB untuk dicetak dan menyimpan Salinan SPB dan untuk dokumen SPB yang asli disimpan di Syahbandar.

c. Kendala dalam Penerbitan SPB Online

Dalam pengajuan SPB *Online* ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam proses penerbitan.

1. Sering terjadi gangguan jaringan saat proses verifikasi atau pun saat proses penerbitan SPB *Online*
2. Permasalahan sistem dari pusat yang melakukan pembaruan sistem secara tiba – tiba
3. Dokumen yang diunggah oleh pihak pengguna jasa layanan kepelabuhanan seringkali

4. Ada petugas yang masih belum memahami sistem Inaportnet secara keseluruhan, sehingga saat menghadapi kendala, petugas tersebut belum mengetahui cara mengatasinya, sehingga berdampak pada keterlambatan proses penerbitan.

d. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pada saat proses penerbitan SPB

1. Pemeliharaan dan melakukan upgrade koneksi jaringan secara rutin agar sistem tidak mengalami *error*.
2. Jika terjadi pembaruan sistem inaportnet sebaiknya dari pusat memberikan pemberitahuan atau koordinasi terlebih dahulu sehingga petugas dapat memberitahukan ke pihak pengguna jasa layanan kepelabuhanan untuk beralih ke pengajuan secara manual.
3. Jika dokumen yang diupload tidak terbaca di portal, pihak syahbandar akan menghubungi pihak yang mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar untuk mengunggah kembali dokumen dengan ukuran yang lebih kecil atau membawa dokumen secara manual ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Manado untuk diperlihatkan ke petugas syahbandar.
4. Bagi petugas syahbandar yang belum memahami secara keseluruhan sistem layanan inaportnet akan diadakan bimbingan teknis atau diklat mengenai sistem inaportnet agar pemahaman mengenai sistem inaportnet lebih meningkat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian Studi tentang penerbitan surat Persetujuan Berlayar *Online* di KSOP Kelas III Manado, ada beberapa poin yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Studi ini mengkaji penerapan Inaportnet dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) online di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Inaportnet memiliki dampak positif dalam mempercepat dan mempermudah proses penerbitan SPB. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproses dokumen, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data. Penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam penerapan Inaportnet, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan bagi petugas, serta resistensi terhadap perubahan dari beberapa pihak terkait, dan kapasitas ukuran file dokumen kapal yang terlalu besar sehingga menyebabkan waktu yang tidak efisien dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar *online*. Meskipun demikian, manfaat yang diperoleh dari implementasi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kendala yang ada. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Diperlukan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur

teknologi untuk memastikan kelancaran operasional Inaportnet. Ini termasuk peningkatan jaringan internet dan perangkat keras yang digunakan di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado. Pelatihan dan Peningkatan SDM: Mengadakan pelatihan rutin dan program pengembangan bagi petugas yang terlibat dalam penerapan inaportnet. Hal ini akan memastikan bahwa semua petugas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sistem Inaportnet secara efektif. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pengguna jasa kepelabuhanan kepentingan terkait manfaat dan cara kerja Inaportnet. Ini akan membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan penerimaan terhadap sistem baru. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Inaportnet dan mencari umpan balik dari pengguna untuk terus melakukan perbaikan dan penyesuaian sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah lainnya, perusahaan pelayaran, dan stakeholder industri pelabuhan untuk memastikan implementasi Inaportnet berjalan dengan baik dan mendukung tujuan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam proses penerbitan SPB. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan implementasi Inaportnet dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi proses penerbitan SPB online di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang sudah membantu sehingga penelitian ini boleh selesai dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado kepada pimpinan dan seluruh staf dan pegawai KSOP Kelas III Manado yang sudah memberikan kesempatan untuk melaksanakan praktek darat di KSOP Kelas III Manado.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Yustiani Frastika, M.Sc dan Bapak Ikhsan Saifudin, S.S.T.Pel yang telah memberikan arahan dan saran dan juga yang sudah sabar dalam membimbing dan membantu selama penelitian.

7. DAFTAR REFERENSI

- Hardjono, S. (2018). *Transportasi laut: Konsep dan implementasi*. Jakarta: Indonesia.
- Peraturan Menteri Nomor: PM 154 Tahun (2015). Tentang surat persetujuan berlayar syahbandar online.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 157 Tahun (2015). Tentang penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.
- Peraturan Menteri Perhubungan: PM 36 Tahun (2012). Tentang organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.
- Priyono, M. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif* (ed. Teddy Chandra). Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Putri, E. (2016). Pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar dalam penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3809>
- Suhendra, H. (2020). *Manajemen pelabuhan dan transportasi laut*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran (Pasal 207). Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.